



The Challenges and Obstacles of PPKPT in Handling Sexual Violence on Vocational Campuses

Hosea Sitepu

Politeknik Negeri Lhkseumawe

Email : hoseasitepu@pnl.ac.id

Supriadi

Politeknik Negeri Lhkseumawe

Email : supriadi@pnl.ac.id

ABSTRACT

Sexual violence in higher education environments, including vocational campuses, is a serious issue that requires comprehensive and sustainable handling. The Indonesian government established the Sexual Violence Prevention and Handling Task Force (PPKPT) as an institutional effort to create a safe and dignified campus environment. However, in practice, PPKPT faces various challenges and obstacles that affect the effectiveness of its duties. This study aims to analyze the challenges and obstacles faced by PPKPT in addressing sexual violence in vocational campuses (a case study of vocational schools in Aceh) using a qualitative research method with in-depth interviews. The research informants include PPKPT members, university leaders, lecturers, and students. The results of the study show that the main challenges faced by PPKPT include limited human resources and budget, low awareness among the academic community, a strong patriarchal culture, victims' fear of reporting, as well as pressure and intimidation from the perpetrators of violence. Structural barriers, such as internal institutional bureaucracy, also serve as hindrances. This study recommends strengthening PPKPT's capacity, the commitment of campus leadership, and the development of a reporting system that is safe and victim-oriented.

Keywords: PPKPT, sexual violence, challenges and obstacles

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang aman bagi seluruh sivitas akademika dalam menjalankan aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun demikian, berbagai laporan menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih terjadi di lingkungan kampus, termasuk di kampus vokasi yang memiliki karakteristik pembelajaran berbasis praktik, magang, dan relasi kerja yang intens (Kumari & Syarif, 2023).

Kampus vokasi memiliki potensi kerentanan yang lebih tinggi terhadap terjadinya kekerasan seksual karena adanya interaksi langsung di bengkel, laboratorium, tempat praktik kerja industri, serta hubungan hierarkis yang kuat antara dosen, instruktur, pembimbing lapangan, dan mahasiswa (Kurniaty, 2025). Dalam konteks ini, keberadaan PPKPT menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Meskipun PPKPT telah dibentuk secara struktural di banyak perguruan tinggi vokasi, implementasi tugas dan fungsinya belum sepenuhnya berjalan optimal. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengungkapan tantangan dan hambatan yang dihadapi PPKPT dalam penanganan kekerasan seksual di kampus vokasi melalui pendekatan kualitatif berbasis wawancara.

Kebijakan PPKPT merupakan evolusi dari Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS, dengan perluasan cakupan pada semua bentuk kekerasan. Secara teoretis, efektivitas implementasi kebijakan dapat dilihat dari kerangka *policy implementation* Van Meter dan Van Horn tahun 1975, yang melibatkan variabel standar dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi, hingga lingkungan sosial dan ekonomi (Anwar & Syafriyani, 2025).

Penelitian terdahulu oleh Komnas Perempuan tahun 2025 menyoroti bahwa hambatan implementasi PPKPT sering muncul di titik-titik terdepan pelayanan, termasuk dalam proses advokasi dan pemulihan korban (Asih & Prawitasari, 2025). Studi kasus di Universitas Khairun mengindikasikan pola kerja Satgas yang cenderung pasif dan legalistis, hanya bergerak setelah ada laporan formal tertulis (Permana et al., 2025). Di sisi lain, inisiatif seperti kampanye Teman bicara dari Satgas PPKPT Universitas Airlangga menawarkan pendekatan yang lebih pro-aktif dan korban-sentrис dengan prinsip Bebas Intervensi, Cermat, Aman, dan Menjaga Kerahasiaan (Ramasari et al., 2025).

Namun, studi-studi tersebut belum secara spesifik membedah lingkungan vokasi. Karakteristik pembelajaran vokasi—seperti lokus kegiatan di luar kelas (workshop, magang), hierarki instruksional yang kaku, dan kuatnya jaringan dengan dunia industri—dapat memodifikasi bentuk dan pola tantangan yang dihadapi Satgas PPKPT. Penelitian ini berusaha menjawab kekosongan analisis tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam (in-depth interview) (Azizah et al., 2022). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengalaman, pandangan, dan persepsi para informan terkait peran dan kinerja PPKPT.

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi fenomenologi, untuk memahami secara mendalam pengalaman dan interpretasi subjek penelitian terhadap fenomena yang diteliti (Nasir et al., 2023).

Partisipan dan Teknik Pengambilan Sampel

Partisipan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: (1) pernah terlibat langsung dalam penanganan minimal satu kasus dugaan kekerasan seksual di kampusnya, dan (2) telah menjabat sebagai anggota atau koordinator Satgas PPKPT minimal satu semester. Total terdapat tujuh (7) informan yang berhasil diwawancara, berasal dari tiga perguruan tinggi vokasi negeri di Aceh (Suriani & Jailani, 2023).

Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur mendalam (*in-depth interview*) *offline*. Panduan wawancara berfokus pada pengalaman menangani kasus, prosedur yang diterapkan, kendala yang dihadapi, serta persepsi tentang dukungan institusi. Setiap wawancara berdurasi 60-90 menit, direkam setelah memperoleh izin, dan ditranskrip secara verbatim untuk dianalisis. Observasi tidak terlibat dan studi dokumen (seperti SOP internal) digunakan sebagai data triangulasi.



Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis tematik model Braun & Clarke melalui enam tahap: (1) familiarisasi dengan data, (2) pembuatan kode awal, (3) pencarian tema, (4) peninjauan tema, (5) pendefinisian dan pemberian nama tema, dan (6) produksi laporan. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan *member checking* dengan mengkonfirmasi interpretasi hasil wawancara kepada partisipan (Rozali, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan, penulis dapat menguraikan tentang tantangan dan hambatan yang dirasakan oleh PPKPT dalam penanganan kekerasan seksual di kampus vokasi (studi kasus Politeknik Negeri Lhoseumawe). Dalam penelitian ini, penulis memperoleh hasil wawancara mengenai tantangan dan hambatan PPKPT dengan membaginya kedalam beberapa tema.

Dari wawancara dengan salah satu narasuber ibu N dengan tema kompleksitas konteks vokasi mengungkap bahwa karakteristik unik pendidikan vokasi menciptakan lapisan tantangan tersendiri yang membedakannya dari penanganan kasus di lingkungan akademik teoritis. Salah satu sub-tema utama yang muncul adalah lokasi kejadian yang seringkali berada di luar kampus. Dari informan menyatakan bahwa kasus-kasus dugaan kekerasan seksual justru banyak terjadi di lokasi magang atau bengkel mitra industri, di mana yurisdiksi dan kewenangan formal Satgas PPKPT kampus menjadi tidak jelas dan terbatas. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang Koordinator Satgas ibu N berikut penuturan hasil wawancaranya,

"Kasus terbaru kami terjadi di bengkel mitra magang. Mahasiswa takut melapor karena takut dipecat dari magang dan nilainya jelek... Kami kesulitan investigasi karena akses ke lokasi dan wawancara dengan pihak mitra sangat dibatasi"

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dinamika antara instruktur, mandor industri, dan mahasiswa tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga sangat menentukan nilai, kelulusan, dan bahkan prospek kerja mahasiswa. Ketimpangan kuasa ini dinilai oleh informan menciptakan kerentanan yang tinggi dan menjadi alat tekanan yang efektif untuk membungkam korban. Korban tidak hanya menanggung beban trauma, tetapi juga ketakutan nyata terhadap implikasi akademis dan profesional jika mereka bersuara.

Selain itu aktivitas pembelajaran praktik dan magang yang tersebar di berbagai lokasi, seringkali dengan intensitas kecil (satu atau dua mahasiswa per mitra), membuat pengawasan dari kampus menjadi sangat sulit. Kondisi ini menciptakan ruang yang potensial untuk terjadinya pelanggaran, sekaligus menyulitkan Satgas untuk mendapatkan bukti atau saksi selain dari pihak-pihak yang terlibat langsung. Kombinasi faktor ini lokasi eksternal, relasi kuasa yang timpang, dan minimnya pengawasan memperkuat temuan bahwa penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi vokasi memerlukan pendekatan dan protokol kolaboratif khusus yang melampaui batas-batas fisik dan administrasi kampus.

Tema kedua adalah Keterbatasan Kapasitas & Sumber Daya yang secara fundamental membatasi efektivitas operasional Satgas PPKPT. Hambatan ini bersifat multi-aspek, mulai dari kesiapan SDM, beban kerja, hingga dukungan finansial. Pertama, pelatihan yang dianggap tidak spesifik dan kurang memadai menjadi keluhan universal. Para anggota Satgas menyatakan bahwa pelatihan yang diterima bersifat umum, singkat, dan tidak membekali mereka dengan keterampilan teknis yang diperlukan untuk menangani kompleksitas kasus kekerasan seksual. Seorang anggota Satgas ibu SA mengungkapkan dengan gamblang,



"Kami hanya dilatih 2 hari saat pertama dilantik. Saat menghadapi kasus dengan pelaku dosen senior, saya sendiri bingung strategi wawancaranya agar adil".

Dari pernyataan ini mengindikasikan bahwa pelatihan yang ada belum menyentuh aspek-aspek kritis seperti teknik investigasi yang sensitif gender, metode wawancara dalam situasi kuasa yang tidak setara, atau pendampingan awal untuk korban trauma. Beban ganda yang harus ditanggung anggota Satgas memperparah masalah kapasitas. PPKPT adalah tugas tambahan di luar tanggung jawab utama mereka sebagai dosen atau tenaga kependidikan. Akibatnya, ketersediaan waktu dan energi untuk menangani kasus yang seringkali membutuhkan pendalaman dan kecepatan respon menjadi sangat terbatas. Konflik prioritas ini sering membuat penanganan kasus berjalan lambat.

Keterbatasan anggaran juga merupakan hambatan struktural yang nyata. Satgas tidak memiliki alokasi dana khusus yang memadai untuk mendukung proses penanganan kasus secara komprehensif. Keterbatasan ini berdampak langsung pada kualitas pendampingan korban, sebagaimana disampaikan oleh informan ibu A menuturkan .

"Kami juga tidak punya dana untuk rujukan psikolog klinis untuk korban".

Ketidaaan anggaran untuk layanan pendukung profesional seperti psikolog atau konsultan hukum tidak hanya membebani anggota Satgas yang tidak kompeten di bidang tersebut, tetapi juga berpotensi menyebabkan pemulihan korban yang tidak tuntas dan mengurangi kredibilitas Satgas dalam menyediakan dukungan yang berarti.

Resistensi internal dan bahkan bentuk intimidasi hadir sebagai hambatan yang paling personal dan berisiko. Beberapa unit kerja atau individu di lingkungan kampus memandang kerja Satgas sebagai pengganggu atau "pencari masalah", yang berujung pada sikap tidak kooperatif. Lebih mengkhawatirkan lagi, upaya menegakkan aturan justru mengancam keselamatan anggota Satgas itu sendiri. Informan ibu A menuturkan.

"selain itu kami para petugas juga pernah mendapatkan ancaman dan teror akibat ingin mengungkap sebuah kasus kekerasan seksual yang dilakukan salah satu dosen"

Pernyataan ini mengungkap dimensi bahaya fisik dan psikologis yang dihadapi oleh anggota Satgas, yang justru seharusnya dilindungi oleh institusi. Ancaman ini menciptakan iklim ketakutan yang dapat mematikan inisiatif dan keberanian untuk menangani kasus secara objektif. Secara keseluruhan, birokrasi yang lamban, ketergantungan pada politik institusi, dan resistensi yang sampai pada level intimidasi menggambarkan sebuah lingkungan kelembagaan yang belum sepenuhnya berkomitmen untuk mendukung fungsi Satgas PPKPT. Hambatan-hambatan ini tidak hanya memperlambat proses, tetapi secara fundamental dapat menggagalkan tujuan penegakan aturan dan perlindungan korban.

Stigma dan budaya menyalahkan korban masih sangat kental. Korban, alih-alih mendapat dukungan, justru kerap dipertanyakan tindakan dan perilakunya. Fenomena ini sangat menonjol di lingkungan program studi yang didominasi satu gender, seperti teknik. Seorang informan dari fakultas teknik ibu S menyampaikan,

"Budaya di lingkungan teknik masih sangat maskulin. Ketika ada kasus, yang pertama ditanyakan, 'Apa yang dipakai korban? Kenapa sampai di ruangan tertutup?' Ini membuat mahasiswi yang menjadi korban langsung mengurungkan niat melapor"

Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menunjukkan bahwa akar masalah sering dialihkan dari pelaku ke korban, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak empatik bagi penyintas. Budaya diam dan anggapan bahwa melapor adalah aib merupakan konsekuensi logis dari stigma yang ada. Banyak korban memilih untuk bungkam karena takut dikucilkan, dicap sebagai pembuat masalah, atau dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran studi dan hubungan



dengan rekan maupun dosen. Ketakutan ini terutama kuat dalam komunitas yang kecil dan erat seperti di kelas atau program studi vokasi tertentu, di mana reputasi pribadi sangat berpengaruh.

Minimnya sosialisasi yang efektif dan kontekstual turut memperkuat tantangan di atas. Menurut para informan, upaya sosialisasi tentang PPKPT dan hak korban masih sering terbatas pada webinar formal berskala besar yang bersifat satu arah. Sosialisasi ini dianggap gagal menyentuh lapisan terdalam budaya kampus, seperti di tingkat program studi, bengkel, atau kelompok praktikum di mana interaksi sehari-hari terjadi. Tanpa sosialisasi berulang yang mengakar dan melibatkan dialog, pemahaman tentang kesetaraan, persetujuan, dan mekanisme pelaporan yang aman tidak akan tertanam, sehingga membiarkan norma lama yang merugikan terus berlangsung.

Temuan penelitian ini mengonfirmasi dan memperdalam hambatan yang telah diidentifikasi dalam studi literatur sebelumnya, sekaligus mengungkap kekhasan konteks vokasi. Kompleksitas Konteks Vokasi menjadi tema pembeda utama. Relasi kuasa dalam setting magang dan praktik seringkali lebih rigid dan memiliki konsekuensi material (nilai, kelulusan, pekerjaan) dibanding di kelas teori, sehingga meningkatkan *vulnerability* korban dan menambah tingkat kesulitan investigasi Satgas.

Keterbatasan Kapasitas yang ditemukan, seperti kurangnya pelatihan khusus, menggemarkan temuan Komnas Perempuan tentang tantangan di ruang terdepan. Di lingkungan vokasi, keterbatasan ini semakin krusial karena Satgas harus memahami dinamika dunia kerja yang menjadi bagian integral dari kurikulum. Hambatan Birokrasi, khususnya ketergantungan pada pimpinan, mencerminkan fenomena yang juga terjadi di Unkhair, di mana Satgas memposisikan diri secara sangat pasif. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa kemandirian dan kewenangan yang memadai, Satgas berisiko menjadi *paper tiger*.

Akhirnya, Tantangan Sosio-Kultural di kampus vokasi, khususnya di bidang-bidang yang didominasi satu gender seperti teknik, tampaknya menguatkan norma gender tradisional dan stigma. Kampanye seperti Teman bicara dari UNAIR yang menekankan keamanan dan kerahasiaan bisa menjadi referensi, namun perlu diadaptasi dengan bahasa dan saluran yang dekat dengan budaya praktik vokasi, misalnya melalui sosialisasi di dalam bengkel atau bersama para instruktur.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan kekerasan seksual oleh Satgas PPKPT di kampus vokasi dihadapkan pada seperangkat hambatan yang saling terkait dan diperparah oleh karakteristik spesifik pendidikan vokasi. Hambatan tersebut bukan hanya bersifat teknis-prosedural (alur, anggaran), tetapi lebih mendalam pada level struktural (birokrasi, hubungan dengan industri) dan kultural (stigma, norma gender). Kombinasi dari faktor-faktor ini berpotensi membuat Satgas tidak efektif dan memperkuat culture of silence yang melindungi pelaku.

Untuk Satgas PPKPT dan pimpinan kampus Vokasi dapat mengembangkan sop penanganan kasus kekerasan seksual di lokasi magang/praktik, termasuk klausul kerja sama dengan mitra industri dan mekanisme penarikan mahasiswa dari lokasi berisiko. Melakukan pelatihan berkala dan khusus bagi anggota satgas yang mencakup investigasi sensitif gender, manajemen trauma, dan negosiasi dalam hierarki kampus/industri

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, N., & Syafriyani, I. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING (STUDI PADA PUSKESMAS GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP). *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 142–149.
- Asih, T. F., & Prawitasari, N. Y. (2025). Efektivitas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 604–610.
- Azizah, N. L., Mahardiani, L., & Yamtinah, S. (2022). Analisis Miskonsepsi Dengan Tes Diagnostik Two-Tier Multiple Choice Dan In-Depth Interview Pada Materi Asam Basa. *Jurnal Pendidikan Kimia*, 11(2), 168–177.
- Kumari, F., & Syarif, J. (2023). *Menapak Jejak Kekerasan Seksual di Dunia Kampus*. Penerbit Adab.
- Kurniaty, Y. (2025). *MODEL IDEAL PENANGANAN DAN SANKSI KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI YANG BERKEADILAN*. Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII.
- Nasir, A., Nurjana, N., Shah, K., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4445–4451.
- Permana, F. I., Ebertha, C. S. E., Maji, H. M., & Millensyah, E. W. M. (2025). Evaluasi Kinerja LLDIKTI Wilayah VII Dalam Pembentukan Satgas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Perguruan Tinggi (PPKPT). *JOSH: Journal of Sharia*, 4(02), 146–166.
- Ramasari, A., Sari, T. A., & Insofia, F. I. (2025). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Satgas PPKS Universitas Airlangga Melalui Implementasi Kebijakan. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 7(2), 308–3012.
- Rozali, Y. A. (2022). Penggunaan analisis konten dan analisis tematik. *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah*, 19, 68.
- Suriani, N., & Jailani, M. S. (2023). Konsep populasi dan sampling serta pemilihan partisipan ditinjau dari penelitian ilmiah pendidikan. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36.

